



### PENATAAN KAWASAN MONPERA JABAR

Pekerja mengoperasikan alat berat saat pengerjaan proyek penataan dan revitalisasi kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/8). Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penataan dan revitalisasi kawasan Monpera Jabar secara berkala yang bakal menjadi kawasan wisata ruang publik dengan sejumlah fasilitas seperti mushola, food festival, shelter sejarah, griya kriya dan teater rakyat.

## Dilanda Kekeringan, Petani Lebak Alih Profesi Jadi Kuli Bangunan

Akibat bencana kekeringan yang saat ini terjadi, kami harus mencari pekerjaan lain untuk menyambung hidup. Karena tanaman padi kami gagal panen dan lahan sawah tidak bisa diolah, ungkap beberapa petani setempat.

**LEBAK (IM)**- Sejumlah para petani di Kabupaten Lebak, beralih profesi sebagai pekerja kuli bangunan, karena sawahnya tidak bisa digarap akibat dilanda kekeringan.

Bahkan, dampak dari kekeringan tersebut, tanaman padi para petani yang baru berusia 2 bulan alami gagal panen dan merugi.

Seperti yang dialami oleh petani di Kampung Nehner, Desa Buyut Mekar, Kecamatan Maja, Lebak, Majen (50), mengaku lahan sawahnya kekeringan dan tanaman padinya tidak bisa dipanen. "Akibat bencana kekeringan yang saat ini terjadi, kami harus mencari pekerjaan lain untuk menyambung hidup.

Karena tanaman padi kami gagal panen dan lahan sawah tidak bisa diolah," ungkap Majen, Jum'at (4/8).

Dikatakan Majen, hanya bisa pasrah dan satu-satunya harapan dalam memulihkan kerugian akibat gagal panen tersebut yaitu perhatian dari pihak pemerintah.

Selain Kekeringan, Kebakaran Lahan Juga Jadi Perhatian BPBD Kabupaten Bogor "Kami hanya bisa pasrah melihat tanaman padi mengering dan gagal panen. Semoga saja ada perhatian dari pemerintah atas kondisi yang kami alami saat ini," katanya.

Diakuinya, saat ini dirinya harus bekerja menjadi kuli bangunan. Karena selama

musim kemarau ini dirinya dan petani yang lain tidak bisa bertani.

"Biasa kita sehari-hari hidup dari tani, tapi sekarang sawah kami kekeringan dan tanaman padi kami gagal panen. Maka untuk menyambung hidup, kami bekerja kuli bangunan," katanya lagi.

Majen menuturkan, dirinya saat ini ikut bekerja bersama tetangganya menjadi kuli bangunan. Soalnya sekarang sawah tidak bisa diolah dan harus menunggu musim penghujan tiba.

"Demi menyambung hidup, soalnya kan kami tidak bisa bertani lagi, nunggu musim penghujan," ujarnya.

Kardi, petani lainnya menambahkan, lahan sawah

kering dan tanaman padi juga sudah banyak yang mengering. Sementara kondisi tanaman saat ini tidak bisa bertani, tapi jika kering seperti ini otomatis akan gagal panen.

"Ya tentu merugi. Karena saat garap sawah dan tanam, kami mengeluarkan biaya tidak sedikit. Tapi tidak bisa menuai hasilnya," tuturnya.

Sekarang ini tambah dia, dirinya harus bekerja serabutan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena saat ini tidak bisa bertani akibat lahan sawahnya kekeringan.

"Kerja apa saja yang penting ada penghasilan, baik kuli bangunan maupun kerja kasar lainnya," tandasnya. ● **pra**

## Pemprov Banten Hanya Dapat Formasi ASN untuk 500 Guru

**SERANG (IM)**- Tahun ini, Pemprov Banten hanya mendapat formasi ASN untuk 500 guru atau tenaga kependidikan yang sebelumnya lulus passing grade. Formasi itu disampaikan Kemenpan RB saat rapat koordinasi pengadaan ASN tahun anggaran 2023 dan uji publik RUU ASN di ballroom Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta, Kamis (3/8) kemarin.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Nana, Supiana mengungkapkan, tahun ini tak ada formasi untuk tenaga teknis dan kesehatan. "Untuk formasi guru sudah sesuai dengan yang kami usulkan," ungkap Nana, Jumat (4/8).

Sementara itu, usai mengikuti rakor, Pj Gubernur Banten Al Muktabar menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan dalam pengadaan ASN tahun 2023 di Provinsi Banten. Salah satunya, pengoptimalan merit sistem yang dimana Provinsi Banten sendiri telah mengimplementasikan hal tersebut.

"Jadi kita mengikuti rapat koordinasi yang dihadiri kepala daerah se-Indonesia, pengarahannya ini mengenai beberapa hal terkait kinerja ASN yang harus terus melakukan upaya pengembangan diri dan karir," ungkap Al.

Ia menambahkan, merit sistem yang terus diupayakan oleh Pemprov Banten itu sendiri sudah sesuai dengan konsentration pemerintah pusat terhadap para ASN untuk mengedepankan digitalisasi dan melek digital.

Dengan arahan Menpan RB Abdullah Azwar Anas, ASN diharapkan memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang

mengedepankan pertimbangan utama dalam proses perencanaan, pekerjaan lebih cepat, tidak terbatas lokasi dan tetap berkomunikasi.

"Dan satu hal yang ditekankan lagi yaitu menyesuaikan pekerjaan kita dengan perkembangan digital. Itu yang menjadi penekanan dari Menpan RB dan kita sedang lakukan dan optimalkan itu," ungkap Al.

Sedangkan, dalam hal perekrutan ASN di lingkungan Provinsi Banten Al Muktabar menjelaskan bahwa Pemprov Banten sedang menunggu formulasi atau surat edaran mengenai perekrutan ASN dari pihak Menpan RB.

Al Muktabar menyatakan, formulasi perekrutan Non-ASN ini sedang dikaji dan di petakan formasinya secara lebih lanjut oleh pemerintah pusat.

"Ini merupakan pengimplementasian dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 56 ayat (1) yang dimana instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja di daerahnya," ungkapnya.

Selain itu, sesuai dengan arahan Menpan RB bahwa fokus perekrutan ASN diberikan pada tenaga pengajar dan kesehatan. Maka dari itu, Al Muktabar menyampaikan bahwa pihaknya sedang menyesuaikan hal tersebut dengan keuangan daerahnya.

"Pada prinsipnya daerah kita membutuhkan itu untuk mendukung kinerja. Tapi diperlukan komposisi pembiayaan dari mana kemampuan keuangan daerah itu cukup terbatas," jelasnya. ● **pra**

## Aplikasi Pujangga Pengadilan Agama Sudah Terintegrasi di Tangerang LIVE

**TANGERANG (IM)**- Seluruh pelayanan Pengadilan Agama Kota Tangerang yang saat ini telah diakomodasi oleh aplikasi Pelayanan Publik dan Kinerja Pengadilan Agama Kota Tangerang atau Pujangga yang akan terintegrasi di super apps Tangerang LIVE.

Kepala Diskominfo Kota Tangerang, Indri Astuti di Tangerang, Jumat (4/8), mengatakan masuknya layanan pengadilan agama ke Tangerang LIVE merupakan tindak lanjut dari perpanjangan kerja sama dengan Diskominfo.

"Jadi masyarakat bisa lebih mudah mengakses pelayanan pengadilan agama hanya lewat super apps Tangerang LIVE," kata Indri.

Ia mengatakan Diskominfo Kota Tangerang akan membantu pengintegrasian layanan pengadilan agama di aplikasi Pujangga

ke Tangerang LIVE. Hal ini dilakukan, kata dia, supaya seluruh pelayanan dapat tersosialisasikan lebih luas lagi.

"Sebab Tangerang LIVE saat ini mempunyai cakupan yang sangat luas dengan total pengguna berjumlah satu juta lebih," ujarnya.

Kepala Pengadilan Agama Kota Tangerang, Suhardi menambahkan integrasi ini dinilai penting untuk direalisasikan karena aplikasi Pujangga memberikan fitur pelayanan secara lengkap, mulai dari pelayanan pendaftaran sidang, informasi antrian sidang, pembayaran biaya perkara, dan lainnya.

"Sebelumnya aplikasi Pujangga ini merupakan induk dari aplikasi-aplikasi yang sebelumnya telah ada untuk mengakomodasi pelayanan dan kepentingan kinerja pengadilan agama. Intinya, semua pelayanan pengadilan

agama dapat diakses melalui aplikasi tersebut," ujarnya.

Selain itu ia berharap melalui kerja sama yang baru saja terjalin, seluruh pelayanan Pengadilan Agama Kota Tangerang dapat lebih tersosialisasikan dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

"Selama ini Pengadilan Agama Kota Tangerang telah mengembangkan informasi pelayanan melalui website, media sosial, bahkan aplikasi. Setelah PKS (Perjanjian Kerja Sama) ini terjalin, diharapkan peningkatan kinerja sosialisasi, kemudahan aksesibilitas, integrasi pelayanan, dan cakupan pelayanan dapat secepatnya terealisasi. Terlebih, akan mendapatkan support secara penuh dari Diskominfo Kota Tangerang yang selama ini telah terbukti kerjanya," kata Suhardi. ● **pp**



### LEGAL EXPO HARI KEMENKUMHAM DI SEMARANG

Pengunjung berkonsultasi tentang hak cipta produk UMKM dalam pameran Legal Expo Hari Kemenkumham 2023 di halaman Kanwil Kemenkumham Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (4/8). Kanwil Kemenkumham provinsi setempat menggelar Legal Expo 2023 untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membuka layanan seperti administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, konsultasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) serta bazar UMKM dan pameran hasil karya warga binaan lapas.

## Bapenda Kabupaten Serang Hapus Denda Pajak

**SERANG (IM)**- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang berupaya menggenjot capaian pajak di Kabupaten Serang. Salah satu upayanya ialah dengan memberikan kebijakan penghapusan denda untuk semua jenis pajak hingga bulan November. Kepala Bapenda Kabupaten Serang, Mohamad Ishak Abdul Raup mengatakan, sampai saat ini capaian pajak di Kabupaten Serang sudah 50 persen.

"Capaian pajak kita masih di jalur normal sekitar 50 persen, diharapkan nanti pada Desember mencapai 100 persen," katanya, Jumat (4/8).

Ia mengatakan, dari 10 jenis pajak daerah, hanya ada dua yang belum memenuhi target yang telah dicanangkan. Keduanya yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). "Sektor yang di atas 50 persen mulai dari pajak restoran, reklame, pajak air bawah tanah, dari 10 jenis pajak hanya dua yang belum mencapai target yakni PBB sama BPHTB," jelasnya.

Ia mengatakan, pembayaran untuk PBB setiap tahunnya memang selalu menunggu waku jatuh tempohnya. Untuk itu, pihaknya optimistis, capaian pajak di

Kabupaten Serang akan maksimal. "PBB belum mencapai target karena jatuh temponya setiap bulan November, jadi kadang masyarakat menunggu hingga jatuh tempo. Target kita tentu 100 persen, sampai dengan sebelum batas akhir waktu. Mudah-mudahan pas akhir anggaran selesai kita bisa tercapai," jelasnya.

Untuk mengejar capaian-capaian tersebut, pihaknya membuat berbagai upaya agar partisipasi masyarakat meningkat untuk membayar pajak. Salah satunya ialah dengan pemberian stimulus pada wajib pajak.

Selain itu, pihaknya juga menerapkan penghapusan denda pajak bagi seluruh jenis pajak yang akan diberlakukan hingga bulan November. "Bupati juga mengadakan program penghapusan denda pajak seluruh jenis denda pajak sampai dengan bulan November mudah-mudahan bisa berjalan. Otomatis tidak akan kena denda di tahun berikutnya itu ilang otomatis," jelasnya.

Selain itu pihaknya juga menjalin kerja sama dengan Kejari untuk melakukan upaya penagihan piutang pajak. "Kemudian dengan KSOP merak kita kerja sama di mineral bukan logam," pungkasnya. ● **pra**

## DKP Kota Tangerang Gelar Pangan Murah Merdeka di 13 Kecamatan

**TANGERANG (IM)**- Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang, Banten, bekerja sama dengan Perum Bulog dan sejumlah usaha ritel menggelar pangan murah merdeka di 13 kecamatan.

"Kami akan keliling ke 13 kecamatan untuk menggelar pangan murah dalam rangka HUT kemerdekaan RI. Jadwalnya akan disesuaikan," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, Muhdorun di Tangerang, Jumat (4/8).

Ia mengatakan pada pelaksanaan pertama di Perumahan Bona Sari Indah, Kecamatan Tangerang, serta Gor Neglasari, Kecamatan Neglasari pada Kamis (3/8), masyarakat sangat antusias.

Sebanyak 150 paket berisi lima kilogram beras dan satu liter minyak goreng yang dijual dengan harga Rp60 ribu habis terjual.

Terdapat lima produsen penyedia pangan lainnya yang bermitra dengan DKP Kota Tangerang.

Kelima produsen tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pangan seperti gula satu kilogram, tepung satu kilogram, olahan ayam, daging sapi, dan ikan frozen food yang dijual dengan harga yang sangat terjangkau oleh masyarakat. "Ini sebagai bentuk konsistensi kami untuk menyediakan pangan yang berkualitas dan dengan harga yang sangat murah. Di sini harga yang kami tawarkan pun untuk 1 paket ini selisihnya bisa mencapai Rp10 ribu lebih murah dari pasaran," katanya.

Sebanyak 750 kilogram beras dan 156 liter minyak goreng habis terjual. Masyarakat mengaku sangat terbantu dengan ketersediaan pangan dengan harga murah ini. ● **pp**



### KAMPANYE GERMAS HIDUP SEHAT DI BATAM

Dokter memeriksa mata seorang lansia saat Kampanye Gerakan Masyarakat (Germas) Hidup Sehat di kawasan wisata Mangrove Pandang Tak Jemu, Bakau Serip, Batam, Kepulauan Riau, Jumat (4/8). Untuk mewujudkan Indonesia Sehat Pemda setempat bersama TNI dan Polri terus giat mengkampanyekan Gerakan Hidup Sehat dengan berolah raga, pemeriksaan kesehatan secara rutin, serta melakukan pola makan dan pola hidup yang sehat.

## Selama 2023, Kota Tangerang Bangun 69 Jamban Sehat untuk Keluarga

**TANGERANG (IM)**- Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kota Tangerang di Provinsi Banten menargetkan pembangunan 69 jamban sehat untuk keluarga selama tahun 2023.

Menurut Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kota Tangerang, Sugiharto Achmad Bagdja di Tangerang, Jumat (4/8), pemerintah kota merencanakan pembangunan 69 jamban sehat untuk keluarga di 13 wilayah kecamatan berdasarkan usul warga dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

"Permohonan bantuan jamban keluarga sama seperti pembangunan RTLH (rumah tidak layak huni), dilakukan secara merata di seluruh kecamatan sesuai usulan dari warga melalui musrenbang, yang disampaikan kepada kelurahan dan kecamatan," katanya.

Ia menjelaskan bahwa sejak tahun 2015 hingga 2022 pemerintah sudah membangun 6.089 jamban keluarga di 13 wilayah keca-

matan di Kota Tangerang. Perinciannya, 1.692 jamban sehat dibangun tahun 2015, 1.332 jamban sehat dibangun pada 2016, 1.000 jamban sehat dibangun tahun 2017, 1.671 jamban sehat dibangun pada 2018, 354 jamban sehat dibangun pada 2019, 20 jamban sehat dibangun tahun 2021, dan 20 jamban sehat dibangun tahun 2022.

Bio septic tank dengan ukuran sekitar 600 liter, yang diperkirakan bisa digunakan dalam waktu 10 sampai 15 tahun, digunakan dalam pembangunan jamban sehat untuk keluarga. Pembangunan jamban sehat untuk keluarga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung penerapan pola hidup bersih dan sehat guna mewujudkan kota layak huni. "Setelah dilakukan pembangunan jamban sehat diharapkan warga bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat, lalu menjaga fasilitas yang ada, karena pembangunan itu dilakukan dari hasil pajak yang dibayarkan oleh masyarakat," kata Sugiharto. ● **pp**